

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

UZAIR HAIDZIR

NIM. 125010107111051



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI
KABUPATEN SAMPANG**

Identitas Penulis :

a. Nama : Uzair Haidzir

b. NIM : 125010107111051

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penulisan : 12 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.
NIP. 195901261987011002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, SH.,LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.
NIP. 196208051988021001

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT
REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU
NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG**

Identitas Penulis :

a. Nama : Uzair Haidzir

b. NIM : 125010107111051

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 12 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika S.H., M.S.

Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.

NIP. 196111161986011001

NIP. 195901261987011002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati SH., LLM.

NIP. 196607101992032003

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Ibu Dr. Yulianti SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasinya serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan serta motivasinya yang sangat luar biasa dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh teman – teman se-angkatan 2012 yang telah memberikan pengalaman banyak bagi penulis dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
7. Pihak – pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis senutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengertian dan Jenis Narkotika.....	12
B. Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika.....	16
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika	19
D. Tinjauan Pustaka Tentang Rehabilitasi	27
E. Pengertian Dan Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Definisi Operasional.....	37
I. Sistematika Penulisan	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	39
B. Realita Pecandu Yang Direhabilitasi Di Kabupaten Sampang	42
C. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang.....	49
D. Hambatan Dan Upaya Dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang Dalam Mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sampang 3 Tahun Terakhir	3
Tabel 1.2	Originalitas Penelitian	7
Tabel 4.1	Status Sosial Anak Pecandu Narkotika	42



RINGKASAN

Uzair Haidzir, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2018, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG, Dr. Prija Djatmika S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena Kabupaten Sampang yang mempunyai tingkat penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur sangat tinggi. Dalam hasil pra-survei dari penulis, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sampang tidak jarang mengklasifikasikan permasalahan tersebut tidak membedakan pelaku dewasa maupun pelaku anak dibawah umur dengan berbagai alasan tertentu..

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang? (2) Apa hambatan dan upaya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang. Data primer berupa wawancara, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa problematika mengenai Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang. Ditemukan fakta hukum bahwa Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang belum tersedia lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya untuk anak. Hal ini dirasa sangat kurang efektif mengingat semakin meningkatnya para penyalahguna narkoba anak di Kabupaten Sampang. Dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang terdapat sub bidang rehabilitasi dan terapinya, meskipun belum ada tempat rehabilitasi tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Badan Natkotika Nasional Kabupaten Sampang adalah Tidak tersedianya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba anak di Kabupaten Sampang, Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah, Fasilitas/peralatan yang masih kurang, Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat kurang.

SUMMARY

Uzair Haidzir, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, November 2018, Implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation for Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang, Dr. Prija Djatmika S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.

In this skripsi, writer raised problems Implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation for Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang. The choice of the theme because in the Regency of Sampang have the level of drugs abuse involving children under the age of very high. In the result pre survey of the writer, the national narcotics agency in the Regency of Sampang not infrequently classifying that problems is not differentiate between adult and children with various some reason.

Based on it above, this paper talk about : (1) How Implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation for Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang? (2) What obstacles and the efforts of the National Narcotic Agency Regency of Sampang In Implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation for Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang?

Then the writing of a piece of this paper provided by a method of juridical empirical with the methods of an approach to a juridical sociological. The location of the research in the National Narcotic Agency Regency of Sampang. The primary data was in the form of the objective of the interview, secondary, and tertiary offered for its shares will be analyzed writer with uses the technique of the descriptive of qualitative.

From the research with the methods above, writer get the answer of the problems about Implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation for Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang.

A fact found that of the law that The implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation of Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang is hindered by the unavailability of location for rehabilitation for people addicted to narcotic, especially for children. This is regarded ineffective recalling that the number of addicted individuals is rising in the Regency of Sampang. In the organisational structure of National Narcotic Agency in the Regency, sub-field of the rehabilitation and therapy is provided despite the absence of the place to cope with the rehabilitation. Obstacles faced by the National Narcotic Agency Regency of Sampang is The lack of rehabilitation facility of Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang, among other issues such as larger number of the people and area, lack of facilities, human resources, and knowledge about the danger caused by the drug.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor¹ Namun pada perkembangannya, narkotika dalam kegiatan produksi dan impornya sering kali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak lagi semua kegiatan produksi dan impor narkotika dijamin dalam penggunaannya. Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada

¹ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 1

awalnya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.²

Permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia belum bisa terselesaikan oleh pemerintah. Langkah preventif maupun langkah represif dari pemerintah sudah dilakukan, namun langkah-langkah tersebut belum mampu memberikan penyelesaian dari permasalahan ini. Misalnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diharapkan mampu memberikan peringatan kepada pecandu Narkoba.

Perlu diketahui Penyalahgunaan narkoba di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Puslitkes

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015. Keprihatinan ini menggugah KPAI untuk semakin terlibat dengan berbagai pihak untuk memerangi narkoba.³ Pada tahun 2002, secara umum data kasus narkoba yang mengenai anak meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴

Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sampang 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus	
		Anak	Dewasa
1	2015	3 anak	77 orang
2	2016	5 anak	121 orang
3	2017	6 anak	135 orang
4	2018	2 anak	155 orang
Jumlah		16 anak	488 orang

Sumber : Data Primer (Diolah) Polres Kabupaten Sampang, Oktober 2018

Dari tabel tersebut, dapat diketahui jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sampang pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 angka penyalahgunaan narkotika pada anak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan

³ <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>

⁴ Mahdiah, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, Hlm. 13

bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Undang-undang yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Dalam pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut berarti bahwa tidak semua pelaku yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba harus dipidana, terlebih adalah pelaku tersebut melibatkan anak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami masa krisis karena termasuk jenis tindak pidana yang kurang disukai. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini baik dilihat dari sudut efektivitasnya, maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.⁵ Sehingga sangat tepatlah pasal tersebut yang menjelaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun permasalahan lain muncul, yaitu penerapan pasal tersebut oleh masih belum maksimal. Khususnya di Kabupaten Sampang yang mempunyai tingkat penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur sangat tinggi. Dalam hasil pra-survei dari penulis, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sampang tidak jarang mengklasifikasikan permasalahan tersebut tidak

⁵ Barda Nawawi Arief, Pidana Penjara Terbatas : Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan. Hlm. 1

membedakan pelaku dewasa maupun pelaku anak dibawah umur dengan berbagai alasan tertentu.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan⁶

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen

⁶ Bagir Manan dikutip Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta,, 2000, hlm. 9

narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁷

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pembedaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁸

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya

⁷ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 3

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 43

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Tabel 1.2
Originalitas Penelitian

No	Judul	Nama	Universitas	Keterangan	Rumusan Masalah	Perbedaan dan Persamaan
1.	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)	Daniel Saragi 2016	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Lampung.	<p>1. Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah?</p> <p>2. Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalahguna narkotik?</p> <p>3. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala rehabilitasi terhadap anak penyalah</p>	<p>Perbedaan : Penelitian ini membahas upaya rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Lampung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Madura.</p> <p>Persamaan : Pembahasan terkait upaya pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.</p>

					guna narkotika?	
--	--	--	--	--	--------------------	--

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang?
2. Apa hambatan dan upaya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah ada, maka terdapat beberapa Tujuan Penelitian, yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. Khususnya dalam ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sampang dan Pihak Kepolisian sebagai pihak yang berwenang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang pentingnya bahaya terhadap narkoba, terlebih apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak.

3. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengertian dan Jenis Narkotika

1. Pengertian dan Golongan Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Narkotika tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.¹

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari

¹ F Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3

kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

² Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133-137

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba

Namun dalam kenyataannya, narkoba banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

2. Efek Narkoba

Narkoba atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkoba ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkoba memiliki zat-zat daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obata narkoba itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkoba memerlukan pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkoba yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik maupun masyarakat dan Negara.

Sifat menimbulkan rasa ketagihan itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan peredaran gelap ke

berbagai Negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkoba dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang syarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Artinya narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkoba ini sudah masuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone). Definisi lain dari Birio Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "Narcotic Identification Manual", mengatakan bahwa:

Narkoba adalah candu, ganja, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.

3. Tindak Pidana Narkoba dan Jenis Sanksi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.³ Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat,

³ Atmasasmita, Romly, Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm.26.

kejahatan perbankan lintas negara, narkoba, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara.

Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴ Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus

⁴ Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :
"ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."

juga didasari perkembangan tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵

B. Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkoba

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis³⁸ adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi sosial⁶ adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁶ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba

Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut :⁷

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat

inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika

1. Kebijakan Penal

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.⁸

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan :⁹

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

⁸ O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm. 22

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni Press, Bandung, 2005, Hlm. 160

Sanksi pidana diperuntutkan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, maupun moralitas. Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip. Selain itu sanksi pidana juga digunakan terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, dan Negara yang dikhawatirkan dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional. Perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana dikenal adanya azas. Yakni yang dikenal dengan azas legalitas bahwa tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena ditentukan sedemikian oleh suatu peraturan perundangan yang telah ada terlebih dahulu. Azas Legalitas lebih lanjut menjelaskan:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. Analogi yang dimaksud disini adalah tidak berpegang lagi pada aturan yang ada, sehingga bertentangan dengan azas ini.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Azas legalitas pada dasarnya merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Saat ini hukum pidana mengalami suatu pertumbuhan yang dapat dipidana. Terjadinya inflasi hukum ini menurut Hanafi dikarenakan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan

unsur-unsur materiilnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.

4. Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy)

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (penal policy) dan menggunakan upaya non penal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya non penal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹⁰

Kebijakan non penal ini lebih cenderung kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang mana adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Selain upaya penanggulangan narkoba, pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah keterlibatan seseorang terutama para remaja dalam penyalahgunaan bahaya narkoba dengan melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik dengan maksud menyebarkan informasi dan meyakinkan khalayak luas tentang ancaman bahaya narkoba.

Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba terdiri dari:

a. Pencegahan Preventif

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Op, Cit., Hlm.50

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya non penal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi tau pencegahan dalam bidang pencegahan kesehatan mental yang merupakan fokus tau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.¹¹

Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebagainya. Pola pencegahan penyalahgunaan/ketergantungan narkoba dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya supply reduction dan demand reduction, dengan pendekatan security approach dan welfare approach. Supply reduction adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran Narkoba. Seperti upaya pembrantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkoba.

¹¹ Afiatin Tina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 44

b. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem penegakan hukum narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta adanya Pasal yang menjamin upaya pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Treatment dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar

tidak terjerumus kembali. Tujuan terapi dan rehabilitasi menurut The Indonesian Florence Nightingale Foundation adalah sebagai berikut:

- 1) Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.
- 2) Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.
- 3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan utama. Tetapi rumatan (maintene) metode merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

5. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Faktor Kepribadian

Beberapa hal termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri, konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah.

2) Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua, dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu menontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari “kesibukan” bersama teman-temannya. Selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab dari orang tua sangat berperan penting. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggungjawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba

3) Faktor Narkoba

Banyaknya remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba.

4) Faktor Lingkungan

Para remaja tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, kondisi dalam

masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Jika membahas mengenai implementasi hukum maka sangat erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum.⁵⁶ Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:¹²

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.¹³

¹² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Press, Jakarta, 2010, hlm. 111

¹³ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 192

D. Tinjauan Pustaka Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional.

E. Pengertian Dan Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pengertian anak adalah :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai ia berumur 18 Tahun
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama samapi berusia 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

b) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 2) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁵

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

¹⁴ Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku untu Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

¹⁵ Tri Adrisman, Buku Ajar Hukum Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm.34

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak semua manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,

anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

2. Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.¹⁶ Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas - asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak .

¹⁶ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. Ke - 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm.12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Hukum Empiris (yuridis empiris). Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan terkait dengan tema yang di kaji oleh Peneliti, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat di lokasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹ Metode penelitian tersebut akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang, sedangkan aspek sosiologisnya berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

¹Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang sebagai instansi yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dipilihnya Kabupaten Sampang sebagai tempat penelitian penulis, karena tingkat penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang sangat tinggi. Pemilihan lokasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang ialah berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa seluruh kewenangan penindakan terhadap pecandu narkoba dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang.² Terlebih Kabupaten Sampang merupakan daerah tingkat II yang termasuk dalam daerah skalanya kecil dan daerah tertinggal. Serta Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten Religi di Indonesia.

D. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang berwenang menangani pengawasan pariwisata, yaitu dengan cara wawancara kepada responden. Sedangkan Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

² Hasil Wawancara dengan Novita Andriani, S.Pd. Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober 2018

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara dengan staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang.³

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat memperjelas analisis pada data primer yang berhasil diperoleh di lapangan, data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Peraturan Perundang- Undangan
 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Buku – buku kepustakaan dan artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti dari perpustakaan pusat brawijaya dan juga dari perpustakaan Hukum Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapat dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah yaitu dengan menggunakan teknik

³ Ibid

wawancara (*interview*) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumen dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dokumen – dokumen resmi dari berbagai sumber, sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang – undangan maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang (BNN) dan Masyarakat Kabupaten Sampang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Dokter Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Anak pecandu Narkotika.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden dari BNN Kabupaten Sampang. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atau

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴ Responden yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang.

4. Responden

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa responden sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang
- b. Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Novita S.Pd dan Maimun, S. Sos
- c. Dokter Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, dr. Titin Hamidah
- d. Anak pecandu Narkotika (Khoirul Anam, Feri Andreanto, Iqbal Arjun)

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan menjadi suatu hasil yang dapat digunakan oleh penulis untuk mendapat data yang diperlukan. Dari hasil tersebut dilakukan analisis dan diinterpretasikan, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan diinterpretasikan tersebut.⁵ Mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan, penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang ada. Setelah memperoleh data-data yang digunakan

⁴Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 12

⁵M. Syamsyudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2007, hal 58

dalam penelitian ini, baik yang didapat dari studi lapang maupun dari studi kepustakaan yang cukup dan tersusun secara sistematis. Maka akan dianalisis dengan melihat dari penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

H. Definisi Operasional

1. Narkotika

Narkotika ialah obat terlarang yang dikonsumsi oleh anak dibawah umur.

2. Anak

Anak adalah anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika.

I. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang laporan secara rinci pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan yang diambil dan diberikan oleh peneliti dalam penelitian.



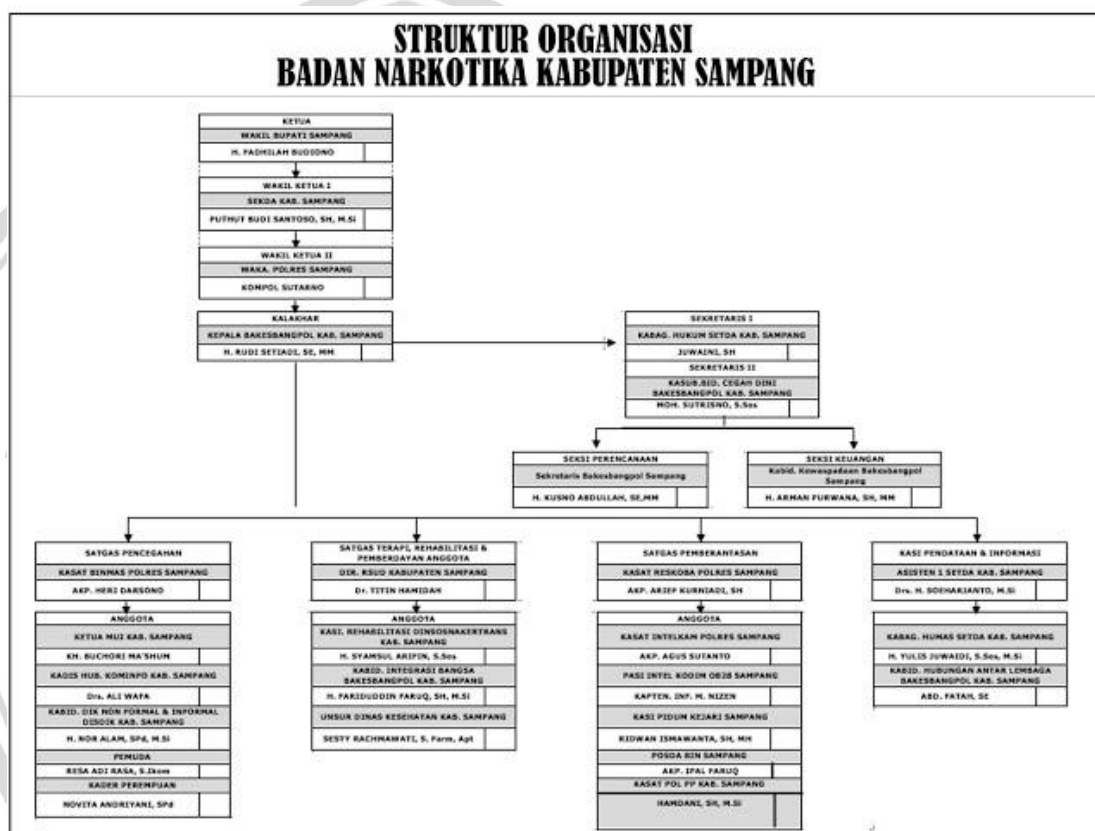
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SAMPANG

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang



1. Kedudukan Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas Badan Narkotika Nasional

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN; Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN; Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN; Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama; Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. REALITA PECANDU YANG DIREHABILITASI DI KABUPATEN SAMPANG

1. Status Sosial Anak Pecandu Narkotika

Menurut laporan dari BNN Kabupaten Sampang tahun 2015 hingga tahun 2018, jumlah pengungkapan kasus Narkoba Anak di Kabupaten Sampang sangat fluktuatif setiap tahunnya, berikut status social anak pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang:

Tabel 4.1
Status Sosial Anak Pecandu Narkotika

Tahun	Nama	Usia	Pendidikan	Status	Alamat
2015	Imron Sadewo	16 Tahun	Tidak Lulus SMP	Pengangguran	Desa Banyuanyar
	Iswanto	16 Tahun	Tidak Lulus SMP	Pengangguran	Desa Pajudan
2016	M. Subhan	17 Tahun	Tidak Lulus SMP	Pengangguran	Desa Komis
	Asmani	17 Tahun	Tidak Lulus SMP	Pengangguran	Desa Ketapang Selatan
	Sulton F.	17 Tahun	SMA	Pelajar	Desa Kaden
	Indra Arrozi	15 Tahun	SMP	Pelajar	Desa Sokobenah
	Alfian Arifandi	16 Tahun	Lulus SD	Pengangguran	Desa Banyuates
2017	Yusril	16 Tahun	Lulus SMP	Pengangguran	Desa Angsokah
	Aris Kurniawan	17 Tahun	SMK	Pelajar	Desa Prajjen
	Saiful Bahri	16 Tahun	Tidak Lulus SMA	Pengangguran	Desa Ketapang
	Iqbal Arjun	16 Tahun	Tidak Lulus SMA	Pengangguran	Desa Ketapang Selatan
	Khoirul Anam	17 Tahun	Tidak Lulus SMA	Pengangguran	Desa Ketapang Selatan
	Samheri	17 Tahun	SMA	Pelajar	Desa Torjun
2018	Khoirul Anam	17 Tahun	SMK	Pelajar	Desa Malakah Jerngik
	Feri Andreanto	16 Tahun	Tidak Lulus SMP	Pengangguran	Desa Sokobenah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober, 2018, diolah.

Analisis Peneliti :

a. Usia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang ditemukan fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak di Kabupaten Sampang mayoritas memiliki usia 15 hingga 17 tahun, yang mana dalam usia tersebut seorang anak berada dalam masa pencarian jati diri. Dari 15 anak pecandu narkotika di Kabupaten Sampang, berdasarkan penelitian peneliti ditemukan fakta hukum bahwa 1 anak berusia 15 tahun, 7 anak berusia 16 tahun dan sisanya yakni 7 anak berusia 17 tahun. Jika terdapat kesalahan dalam pengembangan potensi anak, maka akan berakibat buruk pada perkembangan psikologis pada anak. Dalam hal ini, diperlukan peran yang lebih dari orang tua untuk dapat mengawasi tingkah laku anak dan pergaulan anak.¹ Sehingga menurut hemat peneliti sangat disayangkan apabila seorang anak yang seharusnya menjadi masa depan bangsa akan tetapi terjerumus dan terjerembab didalam pengaruh narkoba. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk melihat fakta hukum faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak-anak di Kabupaten Sampang menyalahgunakan narkoba.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara, usia 15 hingga 18 tahun ialah usia yang sangat menentukan jati diri anak. Kesalahan pergaulan yang dilakukan

¹ Hasil Wawancara dengan dr. Titin Hamidah, Dokter Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober, 2018

oleh anak dapat memicu penyalahgunaan narkoba.² Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, usia 15-17 sangat rentan dengan kesalahan pergaulan. Pengguna narkoba anak di Kabupaten Sampang berusia 15-17 tahun. Sehingga menurut hemat peneliti, seharusnya kesadaran diri dan pengembangan mental harus diupayakan didalam lingkungan ini agar anak-anak di Kabupaten Sampang bisa terhindar dari pengaruh narkoba, karena perjalanan mereka masihlah panjang di dalam keikutsertaan membangun negara.

b. Pendidikan

Menurut narasumber dari hasil wawancara di lapangan peneliti, bahwasannya salah satu peran yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak-anak di Kabupaten Sampang adalah melalui pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tahap awal dari seorang anak untuk mengerti dan memahami serta memilah apa dampak serta kerugian apabila seseorang menggunakan narkoba. Hal ini biasanya kerap kali dilakukan adanya sosialisasi dan pembinaan dari Polisi Sekitar dan BNN Kabupaten Sampang kepada institusi pendidikan sekolah-sekolah yang ada disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang ditemukan fakta hukum bahwa latar belakang pendidikan para pecandu narkoba anak dibawah umur adalah sebagai berikut:³

- 1) 1 anak lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah
- 2) 1 anak lulus SMP dan tidak melanjutkan sekolah

² Hasil Wawancara dengan Feri Andreanto, Anak pecandu narkoba, Oktober, 2018

³ Hasil Wawancara dengan dr. Titin Hamidah, Dokter Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober, 2018

- 3) 1 anak siswa SMP
- 4) 5 anak tidak lulus SMP dan tidak melanjutkan sekolah
- 5) 2 anak pelajar SMA
- 6) 2 anak pelajar SMK
- 7) 3 anak tidak lulus SMA dan tidak melanjutkan sekolah

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, dapat dipertegas bahwa latar belakang pendidikan para pecandu narkoba anak ialah di jenjang pendidikan SMP hingga SMA. Lebih ironisnya lagi, masih terdapat beberapa anak yang tidak mengedepankan pendidikan dan memilih putus sekolah serta tidak melanjutkan pendidikannya. Tentunya hal ini berpengaruh pada pembentukan jati diri, yang mana fungsi sekolah atau pendidikan adalah untuk membentuk jati diri yang lebih berwawasan luas.⁴ Sehingga menurut hemat peneliti seharusnya kedepannya Pemerintah Kabupaten Sampang lebih mengedepankan pendidikan dan melakukan edukasi ke sekolah – sekolah tentang pentingnya pendidikan yang mana dapat membentuk karakter seseorang. Tentu dampak dari putusnya pendidikan dapat berakibat pada psikologis anak yang tidak terkontrol. Hal inilah yang memicu anak menyalahgunakan narkoba.

c. Status

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang ditemukan fakta hukum bahwa latar belakang pekerjaan atau status sosialnya adalah sebagai berikut :

- 1) 5 anak pelajar

⁴ Hasil Wawancara dengan Feri Andreanto, Anak pecandu narkoba, Oktober, 2018

2) 10 anak pengangguran

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa latar belakang status sosial anak pecandu narkoba di Kabupaten Sampang adalah mayoritas pengangguran yang mana mereka telah putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Status sosial sangat berpengaruh pada daya kembang pikir anak yang mana jika anak tersebut tidak sekolah dan menganggur, maka dia akan menjadi liar dan mencari lingkungan yang membuat mereka nyaman walaupun dengan cara yang tidak baik atau bahkan dilarang oleh negara. 5 siswa pelajar sekolah di Kabupaten Sampang juga turut menyalahgunakan narkoba yang mana berdasarkan penelitian peneliti, para pelajar tersebut berada dalam lingkungan yang tidak baik atau bercampur dengan orang dewasa yang pengangguran dan menyalahgunakan narkoba. Sebagian besar para pengangguran putus sekolah memiliki lingkungan yang tidak baik sehingga mereka mengonsumsi narkoba.⁵

Dalam hal ini, peran serta orang tua sangat diperlukan yakni untuk menumbuhkan rasa peduli pada pendidikan bagi sang anak. Pentingnya pendidikan dan status sosial pada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak dan menentukan masa depan anak. Beberapa anak yang putus sekolah sangat disayangkan karena akan memperburuk kondisi bangsa kita.⁶ Pandangan peneliti bahwa anak pecandu narkoba di Kabupaten Sampang masih dalam usia sekolah

⁵ Hasil Wawancara dengan Iqbal Arjun, Anak pecandu narkoba, Oktober, 2018

⁶ Hasil Wawancara dengan Khoirul Anam, Anak pecandu narkoba, Oktober, 2018

dan sangat membutuhkan tuntunan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Sekolah pun memiliki peran penting dalam edukasi anak didik mereka.

2. Faktor Penyebab Anak Menjadi Pecandu Narkotika dan Direhabilitasi di Kabupaten Sampang

Berdasarkan penelitian yang dilakuka oleh peneliti di BNN Kabupaten Sampang, ditemukan fakta hukum bahwa faktor penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika adalah sebagai berikut:⁷

a. Faktor Diri

Faktor diri yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa seorang anak memiliki keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari. Alasan lainnya ialah bahwa soerang anak memiliki keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu. Hal inilah yang memicu anak untuk mencoba dan menggunakan narkoba.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa seorang anak berasal dari keluarga yang tidak harminis dimana kedua orang tua mengalami perceraian dan perpisahan. Selain itu lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba. Hal inilah yang memicu anak untuk mencoba dan menggunakan narkoba.

⁷ Sumber Wawancara dengan dr. Titin Hamidah Bidang Terapi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober 2018

c. Faktor Ketersediaan Narkoba

Faktor ketersediaan narkoba yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa tentu kita ketahui bahwa narkoba semakin mudah didapat dan dibeli dan harga narkoba saat ini semakin murah dan mudah dijangkau oleh anak. Hal inilah yang memicu anak untuk mencoba dan menggunakan narkoba.

3. Jumlah Anak Yang Kambuh Dalam Menyalahgunakan Narkotika

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BNN Kabupaten Sampang, ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada lagi anak yang kambuh dalam menyalahgunakan narkotika setelah direhabilitasi oleh BNN Kabupaten Sampang. Hal ini merupakan kondisi yang baik di Kabupaten Sampang.⁸ Sehingga menurut hemat peneliti ketika substansi hukum bisa merubah kultur hukum tentunya akan mendapatkan dinamika kehidupan hukum yang baik. Hal inilah yang sudah terbukti dilakukan oleh BNN Kabupaten Sampang dengan merehabilitasi secara medis dan sosial anak-anak yang dulunya menggunakan narkoba saat ini sudah banyak yang sadar serta mengedepankan tanggung jawab dirinya sebagai salah satu subjek hukum negara yang nantinya pasti akan sangat berguna bagi kepentingan diri sendiri, masyarakat, agama serta negara.

⁸ Ibid

C. IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara

sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapori selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

1. Syarat Penerimaan Anak Yang Bisa Direhabilitasi⁹

Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut :¹⁰

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.

⁹ Ibid

¹⁰ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis³⁸ adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi sosial¹¹ adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya khususnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang telah melakukan rehabilitasi sosial dengan cara penyuluhan terhadap para mantan penyalahguna narkoba, penyuluhan ini ditujukan agar tidak ada lagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Sampang. Penyuluhan ini sangat di apresiasi oleh beberapa desa di Kabupaten Sampang, sehingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang melakukan penyuluhan secara berkala walaupun tidak ada penyalahguna di desa tersebut.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan

¹¹ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

2. Prosedur dan Proses Rehabilitasi¹²

Tahapan Rehabilitasi Anak Di Kabupaten Sampang

1. Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi / keadaan sebelumnya. Bagi seorang penyalahguna atau pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani dalam rangka full recovery (pemulihan sepenuhnya), untuk hidup normatif, mandiri dan produktif di masyarakat.
2. Rehabilitasi berkelanjutan seorang pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis / mental seorang pecandu narkoba melalui layanan kesehatan dan terapi medis / psikiatrik. Tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi sosial yang bertujuan mengintegrasikan (menyatukan) kembali seorang pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku, dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

¹² Hasil Wawancara dengan Novita S.Pd. Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang

3. Berikutnya adalah tahapan bina lanjut (aftercare) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi seorang pecandu narkoba setelah menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral (menyatu) dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah seorang pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif. Pada kenyataannya terapi ketergantungan narkoba tidak berhenti di dalam tempat rehabilitasi melainkan terus berlanjut sampai seorang residen kembali ke masyarakat dengan menjalani hidup sehat dan menjadi manusia yang produktif.
4. Seorang pecandu narkoba dapat mengikuti program rehabilitasi dengan didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan, terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan terpidana yang telah mendapat penetapan atau keputusan hakim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BNN Kabupaten Sampang, ditemukan fakta hukum bahwa hasil rehabilitasi sangat baik dan dapat memulihkan semangat anak dalam menyongsong masa depan. Dan tidak ada lagi anak pasca menjalani rehabilitasi yang melakukan penyalahgunaan narkoba

lagi. Ini merupakan hasil yang baik atas kinerja BNN Kabupaten Sampang beserta Pemerintah terkait.

Dalam pelaksanaannya khususnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, telah melakukan rehabilitasi medis. Salah satu faktor dari rehabilitasi medis karena adanya laporan dari pihak korban atau pecandu kepihak BNN atau rumah sakit terdekat dan setelah itu ke BNP Jatim. Metode yang digunakan khususnya dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika anak ialah anak penyalahguna narkotika harus di assessment terlebih dahulu dalam hal ini dapat diartikan dengan si anak penyalahguna narkotika dilakukan pengecekan apakah dia termasuk dalam pengguna ringan atau berat karena ini akan menentukan durasi rehabilitasi yang akan dijalani oleh anak penyalahguna narkotika.¹³

Setelah dilakukan assessment yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, akan keluar surat yang digunakan sebagai rujukan ke salah satu tempat rehabilitasi antara lain di Surabaya Menur, di Malang yakni di Rumah Sakit Jiwa Lawang dan juga di Kota Batu yang mana telah ditunjuk oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dan yang memiliki kewenangan untuk memilih lokasi rehabilitasi itu sendiri ialah Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.

Setelah penempatan telah dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, akan dilakukan assessment lagi oleh dokter di lokasi rehabilitasi tersebut dan si anak penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani perawatan medis paling lambat 3 bulan dan paling singkat 15 hari. Proses rehabilitasi medis dilakukan dengan

¹³ Sumber Wawancara dengan dr. Titin Hamidah Bidang Terapi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober 2018

pemberian obat-obatan yang bertujuan untuk penyembuhan serta keseluruhan obat-obatan yang berkaitan dengan penyembuhan pasien adalah gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, mengapa di Kabupaten Sampang sendiri belum ada tempat untuk rehabilitasi ialah dikarenakan di Kabupaten Sampang secara khususnya belum ada tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak

dan saat ini masih dalam tahap pengajuan panti rehabilitasi kepada Pemerintah setempat. Di Pulau Madura yang berdekatan dengan Kabupaten Sampang sebenarnya telah berdiri tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, yakni di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini penempatan rehabilitasi yang dilakukan terhadap pelaku penyalahguna narkoba khususnya yang berasal dari Kabupaten Sampang tidak di tempat rehabilitasi yang ada di Kabupaten Pamekasan ialah dikarenakan tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kabupaten Pamekasan dipungut biaya dalam seluruh proses penyembuhannya. Pemungutan biaya yang dilakukan oleh panti rehabilitasi Kabupaten Pamekasan sangat bertolak belakang dengan keinginan dari Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penyembuhan secara gratis atau tidak dipungut biaya sedikitpun.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sampang belum tersedia lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya untuk anak. Hal ini dirasa sangat kurang efektif mengingat semakin meningkatnya para penyalahguna narkoba anak di Kabupaten Sampang. Dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang terdapat sub bidang rehabilitasi dan terapinya, meskipun belum ada tempat rehabilitasi tersebut. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

¹⁴ Ibid

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang didapatkan data bahwa Kabupaten Sampang telah melakukan rehabilitasi social. Dalam hal ini seluruh elemen Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat turut memberikan berbagai wejangan terhadap para elemen masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sosialisasi dalam berbagai kegiatan antara lain kegiatan keagamaan maupun kegiatan social lainnya. Di dalam kegiatan tersebut selalu diselipkan mengenai bahaya dan kerugian terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini dirasa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang sangat efektif dalam mengurangi penyalahguna narkotika khususnya bagi anak.

3. Bentuk Rehabilitasi¹⁵

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi

¹⁵ Ibid

semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

c. Rehabilitasi Pendidikan (*Education Rehabilitation*)

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik dan akademik). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada kemampuan, karakteristik individu, dan bertolak dari itulah program layanan dilaksanakan.

Peranan dalam rehabilitasi pendidikan pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit, atau stabilisasi kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Pada dasarnya adalah meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan dimasyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial ekonomi.

4. Hasil Rehabilitasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BNN Kabupaten Sampang, ditemukan fakta hukum bahwa hasil rehabilitasi sangat baik dan dapat memulihkan semangat anak dalam menyongsong masa depan. Dan tidak ada lagi anak pasca menjalani rehabilitasi yang melakukan penyalahgunaan narkoba lagi. Ini merupakan hasil yang baik atas kinerja BNN Kabupaten Sampang beserta Pemerintah terkait. Dengan seperti itu maka arah jalan dan masa depan pecandu narkoba di kabupaten Sampang yang dulunya banyak anak-anak dibawah umur maka akan dapat dicegah serta ditanggulangi menuju kehidupan yang lebih baik.

D. HAMBATAN DAN UPAYA DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SAMPANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG

1. Hambatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang Dalam Mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁶

a) Faktor Non Yuridis

1) Faktor Internal

a) Kepribadian

Beberapa hal termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri, konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah. Sehingga faktor kepribadian menurut hemat peneliti merupakan faktor utama bagi seseorang didalam mengambil keputusan salah satunya ialah keputusan untuk menggunakan narkoba atau bahkan menjauhinya. Salah satu yang mempengaruhi faktor kepribadian seseorang agar lebih baik ialah menambah tebal keimanan dan ilmu keagamaan karena tidak ada satupun agama didunia ini yang membenarkan dan memperbolehkan menggunakan narkoba.

¹⁶ Sumber Wawancara dengan dr. Titin Hamidah Bidang Terapi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, Oktober 2018

b) Faktor Non Yuridis

1) Faktor Eksternal

a) Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua, dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu menontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari “kesibukan” bersama teman-temannya. Selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab dari orang tua sangat berperan penting. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggungjawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba. Menurut peneliti keluarga merupakan faktor kedua setelah faktor kepribadian didalam seseorang menggunakan narkoba atau menghindarinya. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai tempat pendidikan terkecil dan tempat kembalinya seseorang ketika senang maupun susah.

b) Faktor Narkoba

Banyaknya remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba. Oleh karena itu menurut peneliti seharusnya peredaran narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sampang pada khususnya haruslah diberantas dengan tegas oleh semua elemen serta kesadaran dari semua orang untuk benar-benar menjauhi dari bahaya

laten narkoba. Sehingga meskipun narkoba itu banyak, tetapi apabila tidak ada yang membeli dan menggunakannya maka barang haram ini hanyalah seperti sampah yang tidak akan dijumpai, dicium bahkan dilihat oleh semua orang.

c) Faktor Lingkungan / Sosial

Para remaja tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Menurut peneliti, faktor lingkungan atau sosial merupakan faktor terpenting ketiga setelah faktor kepribadian dan faktor keluarga. Hal ini dikarenakan lingkungan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat hidup serta tempat berinteraksi antara satu orang dengan yang lainnya. Maka dari itu faktor lingkungan atau sosial sangat mempengaruhi terbentuknya jiwa dan mental seseorang termasuk seseorang yang ingin menyalahgunakan narkoba.

Jika membahas mengenai implementasi hukum maka sangat erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hambatan yang dirasakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Maimun, S. Sos Staff Bagian Pendataan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang

a. Faktor Yuridis

1) Faktor tidak tersedianya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba anak di Kabupaten Sampang (Faktor Yuridis)

Peraturan terkait Di kabupaten Sampang belum mengatur mengenai ketersediaan tempat rehabilitasi anak. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan kebijakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkoba khususnya belum efektif. Hal ini sangat menjadi hambatan terberat bagi Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sampang karena lokasi rehabilitasi tidak tersedia.¹⁸

2) Faktor Struktur

Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang sebanding dengan jumlah aparat serta pemerintahan dirasa menjadi hambatan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Hal ini sangat memperlambat kinerja Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sampang dalam penyebaran bahaya narkoba khususnya untuk anak yang mana bertujuan agar anak dapat terbebas dari narkoba.

3) Fasilitas/peralatan yang masih kurang.

Tidak tersedianya tempat atau panti rehabilitasi di Kabupaten Sampang menjadi factor penghambat pelaksanaan kebijakan. Factor terpenting dalam pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkoba Di Kabupaten Sampang adalah panti rehabilitasi khusus anak.

¹⁸ Ibid

- 4) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat kurang (Faktor Sosial)

Pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba yang masih sangat minim menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana dalam hal ini sangat dibutuhkan peran masyarakat khususnya orang tua dalam mengontrol perilaku sang anak sehingga lebih baik. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.¹⁹ Menurut pandangan peneliti bentuk rehabilitasi ini sangat penting bagi anak pecandu narkoba khususnya di Kabupaten Sampang

2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang Dalam Mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang²⁰

Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba terdiri dari:

- a. Pencegahan Preventif

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat

¹⁹ Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 192

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Maimun, S. Sos Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang

berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Upaya non penal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi tau pencegahan dalam bidang pencegahan kesehatan mental yang merupakan fokus tau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.²¹ Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebgainya.

Pola pencegahan penyalahgunaan/ketergantungan narkotika dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya supply reduction dan demand reduction, dengan pendekatan security approach dan walfare approach. Supply reduction adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran Narkoba. Seperti upaya pembrantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkoba. Upaya supply reduction ini tergolong pada pencegahan dan pemberantasan melalui kebijakan penal (penal policy). Sedangkan demand reduction adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap narkoba oleh para penyalahguna. Upaya deman direction ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilakukan dengan

²¹ Afiatin Tina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 44

pendekatan welfare approach yaitu pendekatan kesejahteraan, dengan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila diketahui pola penyebaran dan penularan “penyakit narkoba”. Pencegahan atau prevensi terbagi dalam 3 bagian yaitu:

- 1) Prevensi primer, adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba.
- 2) Prevensi sekunder, adalah terapi (pengobatan) terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba (pasien).
- 3) Prevensi tersier, adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba setelah memperoleh terapi.

Ada 3 kategori penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba:

- 1) Sebagai pasien, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- 2) Sebagai korban, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukan hukuman.
- 3) Sebagai pemakai sekaligus pengedar, perlu mendapat terapi, rehabilitasi dan dilanjutkan dengan proses hukum (hukuman).

b. Preemptif (Pembinaan)

Preemptif (Pembinaan) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Tindakan Polri ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melalui pendekatan sosial, situasional dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan preemptif yang dilakukan Polri

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

c. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem penegakan hukum narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah

penyalahgunaan narkoba, serta adanya Pasal yang menjamin upaya pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

d. Treatment dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahguna narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali. Tujuan terapi dan rehabilitasi menurut The Indonesian Florence Nightingale Foundation adalah sebagai berikut:

1) Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

2) Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan utama. Tetapi rumatan (maintene) metode merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosuehardjo yang mengemukakan: Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Upaya terkait tidak tersedianya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak di Kabupaten Sampang adalah dengan mengajukan panti rehabilitasi anak kepada Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur agar para pecandu anak tidak lagi di rehabilitasi di luar daerah yakni di Surabaya, Malang dan Kota Batu. Upaya terkait jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah

ialah dengan menambah jumlah aparat yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat. Aparat yang dimaksud adalah elemen masyarakat sekitar yang dirasa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa terkait. Sehingga akan lebih mudah dalam penyampaian kepada masyarakat.

Upaya terkait fasilitas / peralatan yang kurang memadai adalah dengan mengajukan panti rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur agar fasilitas tersebut dalam digunakan untuk kepentingan Kabupaten Sampang khususnya untuk rehabilitasi bagi anak yang menyalahgunakan narkotika di Kabupaten Sampang. Upaya terkait hambatan tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat kurang yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang ialah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika yang mana telah dilakukan di sedikitnya 186 Desa di Kabupaten Sampang. Tidak hanya desa yang dengan jarak tempuh yang mudah, namun sosialisasi juga telah dilakukan di Kawasan pegunungan yang umumnya minim akan sentuhan Pemerintah Daerah.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang tidak mengenal waktu, bahkan siang dan malam maupun hari telah dilakukan sosialisasi jika ada permintaan dari Desa setempat. Dalam materi sosialisasi di informasikan kepada masyarakat setempat bahwa jika mereka menemukan anak yang menyalahgunakan narkotika harus segera dilaporkan kepada pihak terkait agar anak tersebut bisa langsung di rehabilitasi sebelum dikenakan hukuman, dan itu sudah di terapkan di semua acara termasuk pengajian ibu-ibu dan ke Sekolah Menengah Pertama. Upaya ini memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat,

karena para orang tua yang dulunya diam saja, sekarang telah banyak yang melaporkan anaknya yang menyalahgunakan narkoba kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang belum tersedia lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkotika khususnya untuk anak. Hal ini dirasa sangat kurang efektif mengingat semakin meningkatnya para penyalahguna narktika anak di Kabupaten Sampang. Dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang terdapat sub bidang rehabilitasi dan terapinya, meskipun belum ada tempat rehabilitasi tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Natkotika Nasional Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan kebijakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika adalah Tidak tersedianya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak di Kabupaten Sampang, Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah, Fasilitas/peralatan yang masih kurang, Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat kurang.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang adalah mengajukan panti rehabilitasi anak kepada Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur agar para pecandu anak tidak lagi di rehabilitasi di luar daerah yakni di Surabaya, Malang dan Kota Batu, dengan menambah jumlah aparat yang ditugaskan untuk melakukan

penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang mana telah dilakukan di sedikitnya 186 Desa di Kabupaten Sampang. Tidak hanya desa yang dengan jarak tempuh yang mudah, namun sosialisasi juga telah dilakukan di Kawasan pegunungan yang umumnya minim akan sentuhan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis³⁸ adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Mengingat bahwa di Kabupaten Sampang belum tersedia lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya untuk anak maka peneliti memberikan saran untuk dibuatnya lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya untuk anak demi efektifitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memudahkan anak dalam proses rehabilitasi. Diharapkan pemerintah Kabupaten Sampang lebih mementingkan dan mengedepankan mental anak kedepannya pasca mereka menjalani rehabilitasi, yang mana masa depan anak masih sangatlah panjang, sehingga diharapkan tidak memberikan trauma yang dapat menghambat perkembangan potensi anak. Diharapkan kepada seluruh anak di Kabupaten

Sampang khususnya untuk menjauhi narkoba dan berperilaku positif bagi kemajuan bangsa dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Afiatin Tina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku untu Polisi, Unicef, Jakarta, 2004
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Atmasasmita, Romly, Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010

- Bagir Manan dikutip Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta,, 2000
- Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, Pidana Penjara Terbatas : Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan
- F Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004, Djambatan, Jakarta, 2004
- H. Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang, Yogyakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora, Jakarta, 2002
- Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009
- Mahdiah, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- Moeljanto, Asas Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Bogor, 2008
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni Press, Bandung, 2005
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan, Kaligis Associates, Jakarta, 2006
- P.A.F Lamintang, Hukum Penetensir Indonesia, Armico, Bandung, 1994
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung, 1983
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi Press, Jakarta, 2010
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudarto. Hukum Pidana, Jilid IA, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975
- Tri Adrisman, Buku Ajar Hukum Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013
- W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Bandung, 1996

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna , dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

INTERNET

<http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>

